



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 83 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 105 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN,
PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perhitungan Alokasi Dana Desa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
22. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun

- 2018 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 19);
23. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 105 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 105) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 23, angka 24, angka 25, dan angka 26 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.

6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BAKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DINPERMASDES adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga.
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut DPU-PR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga.
10. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
11. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Purbalingga.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

21. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
23. Dihapus.
24. Dihapus.
25. Dihapus.
26. Dihapus.
27. Indeks Kemahalan Konstruksi, yang selanjutnya disingkat IKK, adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
28. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
29. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
30. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
31. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
32. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
34. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
35. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
36. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

37. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
38. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
39. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
40. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
41. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
42. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
43. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
44. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
45. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
46. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
47. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDesa dan/atau Perubahan Penjabaran APBDesa.
48. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
49. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
50. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.

51. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 52. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
 53. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
 54. Hari adalah hari kerja.
 55. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
 56. Swakelola pengadaan barang/jasa di desa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh pengelola kegiatan.
 57. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pengalokasian dan pembagian ADD ditetapkan berdasarkan rumus.
- (2) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan berdasarkan asas merata/sama untuk setiap desa dan adil.
- (3) Asas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan atas dasar perhitungan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) ditambah dengan perhitungan pagu Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
- (4) Besarnya Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah ADD Kabupaten yang dibagi secara merata kepada seluruh desa.
- (5) Perhitungan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk setiap desa merupakan perhitungan kebutuhan dan kapasitas fiskal desa yang akan menentukan Nilai Bobot Desa, yang ditentukan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) yang dibagi secara proporsional kepada seluruh desa berdasarkan data *variable independen* yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berwenang.
- (6) Data *Variabel independen* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. bobot jumlah penduduk 20% (dua puluh perseratus);
 - b. bobot angka kemiskinan 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c. bobot luas wilayah 30% (tiga puluh perseratus);
 - d. bobot tingkat kesulitan geografis desa 25% (dua puluh lima perseratus).
- (7) Lokasi dan besaran ADD masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 15 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan BPD.
 - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
 - (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
 - (4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APBDesa.
 - (5) Apabila biaya pengeluaran penghasilan tetap, pembayaran jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, dan tunjangan perbaikan bagi kepala desa dan perangkat desa yang desanya berbengkok minim atau non bengkok masih terdapat kelebihan anggaran dapat dipergunakan pembiayaan lainnya.
4. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan pagu ADD masing-masing desa, dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. Surat Permohonan Penyaluran dari Kepala Desa;
 2. Surat Pengantar berkas permohonan penyaluran dana dari Kecamatan;
 3. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Penyaluran Dana yang telah diverifikasi dari Kecamatan;
 4. Surat Pernyataan Penyaluran ADD;
 5. Berita Acara Penyaluran ADD;
 6. Kuitansi Pembayaran;
 7. Rencana Anggaran Biaya dan desain/gambar teknis;

8. Rencana Penggunaan Dana Tahap I;
 9. Berita acara musyawarah desa;
 10. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Desa;
 11. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kegiatan Pembangunan Fisik dan Non Fisik;
 12. Foto kondisi 0% (nol perseratus);
 13. Foto *copy* nomor rekening pemerintah desa;
 14. Pakta integritas;
 15. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 16. Laporan realisasi ADD tahun sebelumnya;
 17. Peraturan Desa tentang APBDesa hasil/*output* aplikasi Sistem Keuangan Desa.
- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan pagu ADD, dengan persyaratan sebagai berikut :
1. Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Desa;
 2. Surat Pengantar berkas permohonan penyaluran dana dari Kecamatan;
 3. Surat Pernyataan Kelengkapan Berkas Penyaluran Dana dari Camat;
 4. Berita Acara Penyaluran Alokasi Dana Desa;
 5. Kuitansi Pembayaran;
 6. Laporan realisasi keuangan 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan kegiatan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari pencairan Tahap I hasil/*output* Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 7. Rencana Penggunaan Dana Tahap II;
 8. Foto copy buku rekening pemerintah desa.
- c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari keseluruhan pagu ADD murni ditambah pagu ADD perubahan, dengan persyaratan sebagai berikut:
1. Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Desa;
 2. Surat Pengantar berkas permohonan penyaluran dana dari Kecamatan;
 3. Surat Pernyataan kelengkapan berkas dan persyaratan penyaluran dana dari Camat;
 4. Berita Acara Penyaluran Alokasi Dana Desa;
 5. Kuitansi Pembayaran;
 6. Laporan realisasi keuangan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan kegiatan minimal 50% (lima puluh perseratus) dari pencairan Tahap I dan II hasil/*output* Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 7. Rencana Penggunaan Dana Tahap III;
 8. Foto *copy* buku rekening pemerintah desa.
- (3) Format dokumen penyaluran dan pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan dalam Lampiran I diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 17 September 2020

BUPATI PURBALINGGA, *h*


DYAH HAYUNING PRATIWI *h*

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 17 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 83

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 83 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 105 TAHUN 2019 TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA
DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Nama Desa	Kebutuhan Penghasilan			Alokasi Dana Desa Minimem (ADDM)	Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)															Alokasi Prioritas + ADDM + ADDP	Pagu ADD
		Penghasilan Tetap (SILTAP)	Jaminan Sosial	Penghasilan Perbaikan		Jumlah Penduduk			Kemiskinan			Luas Wilayah			Indeks Kesulitan Geografis (IKG)			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula			
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(9)+(12)+(15)+(18)	(20)	(21)=(4)+(5)+(6)+(20)	(22)=(3)+(21)	
1	KEMANGKON																					
1	KEDUNGBENDA	364.412,100	40.960,000	-	103.529,000	4932	0,53%	0,11%	1265	0,70%	0,18%	4,06	0,61%	0,18%	38,89	0,53%	0,13%	0,60%	59.406,837	203.896,000	568.308,000	
2	BOKOL	285.546,300	32.095,000	-	103.529,000	2268	0,24%	0,05%	465	0,26%	0,06%	1,33	0,20%	0,06%	31,04	0,42%	0,11%	0,28%	27.726,982	163.351,000	448.897,000	
3	PELUMUTAN	311.834,900	35.050,000	-	103.529,000	3697	0,40%	0,08%	751	0,42%	0,10%	2,33	0,35%	0,11%	35,49	0,48%	0,12%	0,41%	40.736,538	179.316,000	491.151,000	
4	MAJATENGAH	338.123,500	38.005,000	-	103.529,000	3954	0,42%	0,08%	681	0,38%	0,09%	3,08	0,46%	0,14%	38,14	0,52%	0,13%	0,45%	44.579,902	186.114,000	524.238,000	
5	KEDUNGLEGOK	311.834,900	35.050,000	-	103.529,000	3516	0,38%	0,08%	603	0,34%	0,08%	2,46	0,37%	0,11%	36,65	0,50%	0,12%	0,40%	39.288,759	177.868,000	489.703,000	
6	KEMANGKON	311.834,900	35.050,000	-	103.529,000	4496	0,48%	0,10%	941	0,52%	0,13%	2,56	0,39%	0,12%	38,23	0,52%	0,13%	0,47%	47.040,845	185.620,000	497.455,000	
7	PANICAN	364.412,100	40.960,000	-	103.529,000	5218	0,56%	0,11%	677	0,38%	0,09%	2,92	0,44%	0,13%	23,07	0,31%	0,08%	0,42%	41.438,381	185.928,000	550.340,000	
8	BAKULAN	311.834,900	35.050,000	-	103.529,000	2125	0,23%	0,05%	195	0,11%	0,03%	1,32	0,20%	0,06%	37,96	0,52%	0,13%	0,26%	25.984,256	164.563,000	476.398,000	
9	KARANGKEMIRI	285.546,300	32.095,000	-	103.529,000	2247	0,24%	0,05%	253	0,14%	0,04%	1,86	0,28%	0,08%	30,44	0,41%	0,10%	0,27%	26.958,878	162.583,000	448.129,000	
10	PEGANDEKAN	311.834,900	35.050,000	-	103.529,000	3053	0,33%	0,07%	397	0,22%	0,06%	2,30	0,35%	0,10%	36,84	0,50%	0,13%	0,35%	34.791,010	173.370,000	485.205,000	
11	SENON	364.412,100	40.960,000	-	103.529,000	5102	0,59%	0,11%	643	0,36%	0,09%	3,54	0,53%	0,16%	38,38	0,52%	0,13%	0,49%	48.676,758	193.166,000	557.578,000	
12	SUMILIR	311.834,900	35.050,000	-	103.529,000	1892	0,20%	0,04%	271	0,15%	0,04%	2,33	0,35%	0,11%	38,92	0,53%	0,13%	0,32%	31.413,397	169.992,000	481.827,000	
13	KALIALANG	285.546,300	32.095,000	-	103.529,000	1541	0,17%	0,03%	146	0,08%	0,02%	2,23	0,34%	0,10%	33,15	0,45%	0,11%	0,27%	26.526,583	162.151,000	447.697,000	
14	KARANGTENGAH	364.412,100	40.960,000	-	103.529,000	3239	0,35%	0,07%	567	0,32%	0,08%	2,23	0,34%	0,10%	33,52	0,46%	0,11%	0,36%	36.096,753	180.586,000	544.998,000	
15	MUNTANG	285.546,300	32.095,000	-	103.529,000	1820	0,20%	0,04%	134	0,07%	0,02%	1,60	0,24%	0,07%	33,04	0,45%	0,11%	0,24%	24.101,140	159.725,000	445.271,000	
16	GAMBARSAI	285.546,300	32.095,000	-	103.529,000	1767	0,19%	0,04%	221	0,12%	0,03%	1,61	0,24%	0,07%	24,67	0,34%	0,08%	0,23%	22.402,661	158.027,000	443.573,000	
17	TOYAREKA	338.123,500	38.005,000	-	103.529,000	6023	0,65%	0,13%	376	0,21%	0,05%	3,31	0,50%	0,15%	29,57	0,40%	0,10%	0,43%	42.921,698	184.456,000	522.580,000	
18	JETIS	311.834,900	35.050,000	-	103.529,000	3500	0,38%	0,08%	395	0,22%	0,05%	1,93	0,29%	0,09%	33,11	0,45%	0,11%	0,33%	32.814,471	171.393,000	483.228,000	
19	MAJASEM	311.834,900	35.050,000	-	103.529,000	3840	0,41%	0,08%	468	0,26%	0,07%	2,15	0,32%	0,10%	36,76	0,50%	0,13%	0,37%	36.785,164	175.364,000	487.199,000	
2	BUKATEJA																					
1	TIDU	311.834,900	35.050,000	-	103.529,000	3174	0,34%	0,07%	643	0,36%	0,09%	1,55	0,23%	0,07%	31,74	0,43%	0,11%	0,34%	33.357,096	171.936,000	483.771,000	
2	WIRASABA	416.989,300	46.870,000	-	103.529,000	5436	0,58%	0,12%	1219	0,68%	0,17%	3,56	0,54%	0,16%	32,65	0,44%	0,11%	0,56%	55.504,626	205.804,000	622.893,000	
3	KEMBANGAN	364.412,100	40.960,000	-	103.529,000	8404	0,90%	0,18%	2241	1,25%	0,31%	4,35	0,66%	0,20%	24,83	0,34%	0,08%	0,77%	76.869,971	221.359,000	585.771,000	
4	CIPAWON	364.412,100	40.960,000	-	103.529,000	6435	0,69%	0,14%	1313	0,73%	0,18%	2,86	0,43%	0,13%	25,01	0,34%	0,09%	0,54%	53.212,754	197.702,000	562.114,000	
5	KARANGCENGIS	364.412,100	40.960,000	-	103.529,000	6798	0,73%	0,15%	1330	0,74%	0,19%	3,70	0,56%	0,17%	33,12	0,45%	0,11%	0,61%	60.739,597	205.229,000	569.641,000	
6	KARANGGEDANG	338.123,500	38.005,000	-	103.529,000	6845	0,73%	0,15%	1777	0,99%	0,25%	2,92	0,44%	0,13%	32,63	0,44%	0,11%	0,64%	63.355,074	204.889,000	543.013,000	
7	KARANGNANGKA	311.834,900	35.050,000	-	103.529,000	2920	0,31%	0,06%	866	0,48%	0,12%	1,59	0,24%	0,07%	37,91	0,52%	0,13%	0,38%	38.169,812	176.749,000	488.584,000	
8	KUTAWIS	364.412,100	40.960,000	-	103.529,000	7127	0,76%	0,15%	2171	1,21%	0,30%	4,45	0,67%	0,20%	19,68	0,27%	0,07%	0,72%	71.889,136	216.378,000	580.790,000	
9	KEBUTUH	364.412,100	40.960,000	-	103.529,000	4238	0,45%	0,09%	405	0,23%	0,06%	3,29	0,50%	0,15%	33,41	0,45%	0,11%	0,41%	40.722,981	185.212,000	549.624,000	
10	PENARUBAN	285.546,300	32.095,000	-	103.529,000	1966	0,21%	0,04%	443	0,25%	0,06%	1,24	0,19%	0,06%	32,06	0,44%	0,11%	0,27%	26.760,632	162.385,000	447.931,000	
11	KEDUNGGATI	338.123,500	38.005,000	-	103.529,000	7696	0,83%	0,17%	936	0,52%	0,13%	4,55	0,69%	0,21%	34,91	0,48%	0,12%	0,62%	61.632,778	203.167,000	541.291,000	
12	BUKATEJA	364.412,100	40.960,000	-	103.529,000	8588	0,92%	0,18%	886	0,49%	0,12%	3,66	0,55%	0,17%	18,47	0,25%	0,06%	0,54%	53.277,199	197.766,000	562.178,000	
13	MAJASARI	338.123,500	38.005,000	-	103.529,000	4299	0,46%	0,09%	810	0,45%	0,11%	2,08	0,31%	0,09%	30,17	0,41%	0,10%	0,40%	39.944,362	181.478,000	519.602,000	
14	BAJONG	364.412,100	40.960,000	-	103.529,000	4630	0,50%	0,10%	556	0,31%	0,08%	3,44	0,52%	0,16%	27,08	0,37%	0,09%	0,42%	42.187,151	186.678,000	551.088,000	
3	KEJOBONG																					
1	BANDINGAN	364.412,100	40.960,000	-	103.529,000	5789	0,62%	0,12%	822	0,46%	0,11%	2,95	0,45%	0,13%	20,88	0,28%	0,07%	0,44%	44.055,651	188.545,000	552.957,000	
2	LAMUK	364.412,100	40.960,000	-	103.529,000	3678	0,39%	0,08%	360	0,20%	0,05%	3,14	0,47%	0,14%	40,26	0,55%	0,14%	0,41%	40.542,296	185.031,000	549.443,000	
3	SOKANEGARA	364.412,100	40.960,000	-	103.529,000	3254	0,35%	0,07%	673	0,37%	0,09%	2,55	0,38%	0,12%	42,70	0,58%	0,15%	0,42%	42.156,141	186.645,000	551.057,000	
4	GUMIWANG	311.834,900	35.050,000	87.600,000	103.529,000	2449	0,26%	0,05%	177	0,10%	0,02%	2,19	0,33%	0,10%	32,91	0,45%	0,11%	0,29%	28.630,419	254.809,000	566.644,000	
5	KRENCENG	311.834,900	35.050,000	87.600,000	103.529,000	3664	0,39%	0,08%	881	0,49%	0,12%	2,24	0,34%	0,10%	29,34	0,40%	0,10%	0,40%	39.975,334	266.154,000	577.989,000	
6	NANGKASAWIT	285.546,300	32.095,000	79.800,000	103.529,000	1914	0,21%	0,04%	504	0,28%	0,07%	1,52	0,23%	0,07%	48,02	0,65%	0,16%	0,34%	34.123,346	249.547,000	535.093,000	

2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	19=(9)+(12)+(15)+(18)	(20)	21=(4)+(5)+(6)+(20)	(22)=(3)+(21)
7	PANDANSARI	364,412,100	40,960,000	103,200,000	103,529,000	3861	0.41%	0.08%	1001	0.56%	0.14%	3.28	0.49%	0.15%	44.56	0.61%	0.15%	0.52%	51,890,612	299,580,000	663,992,000
8	KEJOBONG	364,412,100	40,960,000	103,200,000	103,529,000	6050	0.65%	0.13%	937	0.52%	0.13%	4.29	0.65%	0.19%	29.44	0.40%	0.10%	0.55%	55,101,801	302,791,000	867,203,000
9	LANGGAR	364,412,100	40,960,000	103,200,000	103,529,000	6991	0.75%	0.15%	1762	0.98%	0.25%	5.22	0.79%	0.24%	38.54	0.52%	0.13%	0.76%	75,782,410	323,471,000	887,883,000
10	TIMBANG	364,412,100	40,960,000	103,200,000	103,529,000	3561	0.38%	0.08%	523	0.29%	0.07%	3.16	0.48%	0.14%	25.67	0.35%	0.09%	0.38%	37,700,062	285,389,000	649,801,000
11	NANGKOD	311,834,900	35,050,000	87,600,000	103,529,000	2887	0.31%	0.06%	342	0.19%	0.05%	3.97	0.60%	0.18%	46.52	0.63%	0.16%	0.45%	44,453,591	270,633,000	582,468,000
12	KEDARPAN	311,834,900	35,050,000	87,600,000	103,529,000	2340	0.25%	0.05%	433	0.24%	0.06%	2.27	0.34%	0.10%	48.36	0.66%	0.16%	0.38%	37,528,706	263,708,000	575,543,000
13	PANGEMPON	285,546,300	32,095,000	79,800,000	103,529,000	4809	0.52%	0.10%	773	0.43%	0.11%	3.63	0.55%	0.16%	46.65	0.64%	0.16%	0.53%	53,056,625	268,481,000	554,027,000
4	KALIGONDANG																				
1	LAMONGAN	311,834,900	35,050,000	-	103,529,000	2613	0.28%	0.06%	337	0.19%	0.05%	0.95	0.14%	0.04%	41.37	0.56%	0.14%	0.29%	28,505,619	167,085,000	478,920,000
2	TEJASARI	338,123,500	38,005,000	-	103,529,000	2556	0.27%	0.05%	243	0.14%	0.03%	2.22	0.33%	0.10%	37.57	0.51%	0.13%	0.32%	31,483,966	173,018,000	511,142,000
3	CILAPAR	311,834,900	35,050,000	-	103,529,000	2029	0.22%	0.04%	222	0.12%	0.03%	2.46	0.37%	0.11%	41.88	0.57%	0.14%	0.33%	32,619,461	171,198,000	483,033,000
4	PENOLIH	364,412,100	40,960,000	-	103,529,000	3818	0.41%	0.08%	362	0.20%	0.05%	3.16	0.48%	0.14%	31.40	0.43%	0.11%	0.38%	37,962,785	182,452,000	546,864,000
5	SINDURAJA	338,123,500	38,005,000	-	103,529,000	4932	0.53%	0.11%	941	0.52%	0.13%	2.72	0.41%	0.12%	25.93	0.35%	0.09%	0.45%	44,538,143	186,072,000	524,196,000
6	SELAKAMBANG	364,412,100	40,960,000	-	103,529,000	8290	0.89%	0.18%	1861	1.04%	0.26%	6.16	0.93%	0.28%	25.69	0.35%	0.09%	0.80%	79,801,329	224,290,000	588,702,000
7	SELANEGARA	338,123,500	38,005,000	-	103,529,000	3381	0.36%	0.07%	451	0.25%	0.06%	2.27	0.34%	0.10%	31.17	0.42%	0.11%	0.34%	34,182,503	175,717,000	513,841,000
8	KALIGONDANG	338,123,500	38,005,000	-	103,529,000	3218	0.35%	0.07%	209	0.12%	0.03%	2.83	0.43%	0.13%	22.09	0.30%	0.08%	0.30%	29,962,588	171,487,000	509,621,000
9	BRECEK	285,546,300	32,095,000	-	103,529,000	1437	0.15%	0.03%	132	0.07%	0.02%	1.42	0.21%	0.03%	38.61	0.53%	0.13%	0.24%	24,319,941	159,944,000	445,490,000
10	SEMPOR LOR	285,546,300	32,095,000	-	103,529,000	1272	0.14%	0.03%	73	0.04%	0.01%	0.93	0.14%	0.04%	43.27	0.59%	0.15%	0.23%	22,546,769	158,171,000	443,717,000
11	PENARUBAN	338,123,500	38,005,000	-	103,529,000	4977	0.53%	0.11%	210	0.12%	0.03%	1.17	0.18%	0.05%	25.25	0.34%	0.09%	0.28%	27,337,388	168,871,000	506,995,000
12	KALIKAJAR	338,123,500	38,005,000	-	103,529,000	4591	0.49%	0.10%	525	0.29%	0.07%	1.75	0.26%	0.08%	19.30	0.26%	0.07%	0.32%	31,448,418	172,983,000	511,107,000
13	KEMBARAN WETAN	338,123,500	38,005,000	-	103,529,000	3115	0.33%	0.07%	221	0.12%	0.03%	2.44	0.37%	0.11%	35.26	0.48%	0.12%	0.33%	32,591,554	174,126,000	512,250,000
14	SLINGA	311,834,900	35,050,000	87,600,000	103,529,000	5347	0.57%	0.11%	638	0.36%	0.09%	3.94	0.59%	0.18%	32.45	0.44%	0.11%	0.49%	48,894,940	275,074,000	586,909,000
15	ARENAN	364,412,100	40,960,000	103,200,000	103,529,000	3835	0.41%	0.08%	532	0.30%	0.07%	5.72	0.86%	0.26%	34.10	0.46%	0.12%	0.53%	52,770,340	300,459,000	664,871,000
16	SIDANEGARA	311,834,900	35,050,000	87,600,000	103,529,000	3287	0.35%	0.07%	657	0.37%	0.09%	2.42	0.36%	0.11%	29.27	0.40%	0.10%	0.37%	36,870,008	263,049,000	574,884,000
17	PAGERANDONG	311,834,900	35,050,000	-	103,529,000	2100	0.23%	0.05%	604	0.34%	0.08%	2.26	0.34%	0.10%	39.25	0.53%	0.13%	0.36%	36,254,239	174,833,000	486,668,000
18	SIDAREJA	338,123,500	38,005,000	-	103,529,000	4835	0.52%	0.10%	1197	0.67%	0.17%	5.43	0.82%	0.25%	31.02	0.42%	0.11%	0.62%	61,782,537	203,317,000	541,441,000
5	PURBALINGGA																				
1	TOYAREJA	285,546,300	32,095,000	-	103,529,000	2831	0.30%	0.06%	322	0.18%	0.04%	1.77	0.27%	0.08%	33.84	0.46%	0.12%	0.30%	29,898,311	165,522,000	451,068,000
2	JATISABA	338,123,500	38,005,000	-	103,529,000	3578	0.38%	0.08%	383	0.21%	0.05%	2.08	0.31%	0.09%	27.06	0.37%	0.09%	0.32%	31,450,521	172,985,000	511,109,000
6	KALIMANAH																				
1	JOMPO	311,834,900	35,050,000	-	103,529,000	2255	0.24%	0.05%	138	0.08%	0.02%	1.11	0.17%	0.05%	29.33	0.40%	0.10%	0.22%	21,643,733	160,223,000	472,058,000
2	RABAK	285,546,300	32,095,000	-	103,529,000	3117	0.33%	0.07%	143	0.08%	0.02%	1.94	0.29%	0.09%	26.02	0.35%	0.09%	0.26%	26,161,996	161,786,000	447,332,000
3	BLATER	338,123,500	38,005,000	-	103,529,000	3829	0.41%	0.08%	173	0.10%	0.02%	2.01	0.30%	0.09%	28.36	0.39%	0.10%	0.29%	29,204,404	170,738,000	508,862,000
4	MANDURAGA	285,546,300	32,095,000	-	103,529,000	1911	0.21%	0.04%	120	0.07%	0.02%	0.90	0.14%	0.04%	34.93	0.48%	0.12%	0.22%	21,803,170	157,227,000	442,773,000
5	KARANGSARI	285,546,300	32,095,000	-	103,529,000	1820	0.20%	0.04%	111	0.06%	0.02%	1.01	0.15%	0.05%	35.16	0.48%	0.12%	0.22%	21,862,084	157,466,000	443,032,000
6	KALIMANAH KULON	285,546,300	32,095,000	-	103,529,000	2283	0.24%	0.05%	58	0.03%	0.01%	1.11	0.17%	0.05%	38.42	0.52%	0.13%	0.24%	23,674,067	159,298,000	444,844,000
7	SIDAKANGEN	285,546,300	32,095,000	-	103,529,000	2581	0.28%	0.06%	168	0.09%	0.02%	0.95	0.14%	0.04%	32.05	0.44%	0.11%	0.23%	22,947,780	158,572,000	444,118,000
8	KARANGPETIR	285,546,300	32,095,000	-	103,529,000	1424	0.15%	0.03%	102	0.06%	0.01%	0.89	0.13%	0.04%	39.40	0.54%	0.13%	0.22%	21,780,027	157,404,000	442,950,000
9	KALIMANAH WETAN	311,834,900	35,050,000	-	103,529,000	3379	0.36%	0.07%	252	0.14%	0.04%	1.49	0.22%	0.07%	25.03	0.34%	0.09%	0.26%	25,844,243	164,423,000	476,258,000
10	GRECOL	364,412,100	40,960,000	-	103,529,000	4063	0.44%	0.09%	344	0.19%	0.05%	2.01	0.30%	0.09%	35.49	0.48%	0.12%	0.35%	34,481,709	178,971,000	543,383,000
11	SELABAYA	285,546,300	32,095,000	-	103,529,000	4017	0.43%	0.09%	116	0.06%	0.02%	1.10	0.17%	0.05%	28.20	0.38%	0.10%	0.25%	24,670,551	160,295,000	445,841,000
12	KLAPASAWIT	311,834,900	35,050,000	-	103,529,000	4792	0.51%	0.10%	250	0.14%	0.03%	1.51	0.23%	0.07%	40.59	0.55%	0.14%	0.34%	34,186,142	172,765,000	484,600,000
13	KEDUNGWULUH	311,834,900	35,050,000	-	103,529,000	3344	0.36%	0.07%	179	0.10%	0.02%	1.82	0.27%	0.08%	37.00	0.50%	0.13%	0.30%	30,312,899	168,892,000	480,727,000
14	BABAKAN	338,123,500	38,005,000	-	103,529,000	7006	0.75%	0.15%	625	0.35%	0.09%	1.82	0.27%	0.08%	22.81	0.31%	0.08%	0.40%	39,485,602	181,020,000	519,144,000
7	KUTASARI																				
1	KARANGLEWAS	338,123,500	38,005,000	-	103,529,000	2660	0.29%	0.06%	326	0.18%	0.05%	1.01	0.15%	0.05%	29.37	0.40%	0.10%	0.25%	24,667,056	166,201,000	504,325,000
2	MUNJUL	338,123,500	38,005,000	-	103,529,000	3747	0.40%	0.08%	559	0.31%	0.08%	1.52	0.23%	0.07%	33.90	0.46%	0.12%	0.34%	34,014,004	175,548,000	513,672,000
3	SUMINGKUR	364,412,100	40,960,000	-	103,529,000	5162	0.55%	0.11%	1371	0.76%	0.19%	1.88	0.28%	0.09%	35.65	0.49%	0.12%	0.51%	50,488,592	194,978,000	559,390,000
4	MERI	364,412,100	40,960,000	-	103,529,000	4022															

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	19=(9)+(12)+(15)+(1)	(20)	21=(4)+(5)+(6)+(20)	(22)=(3)+(21)
10	CENDANA	364.412,100	40.960,000	-	103.529,000	5148	0.55%	0.11%	1684	0.94%	0.23%	5.85	0.85%	0.26%	39.99	0.54%	0.14%	0.74%	73.219,643	217,709,000	582,121,000
11	CANDIWULAN	364.412,100	40.960,000	-	103.529,000	5567	0.60%	0.12%	1495	0.83%	0.21%	3.40	0.51%	0.15%	27.15	0.37%	0.09%	0.57%	57,014,286	201,503,000	565,915,000
12	KARANGCEGAK	338,123,500	38,005,000	-	103,529,000	6873	0.74%	0.15%	2752	1.53%	0.38%	4.19	0.63%	0.19%	27.03	0.37%	0.09%	0.81%	80,689,163	222,223,000	560,347,000
13	CANDINATA	338,123,500	38,005,000	95,400,000	103,529,000	5807	0.62%	0.12%	2323	1.29%	0.32%	6.67	1.01%	0.30%	32.72	0.45%	0.11%	0.86%	85,550,592	322,485,000	660,609,000
14	KARANGJENKOL	364.412,100	40.960,000	-	103.529,000	4297	0.46%	0.09%	1623	0.90%	0.23%	3.62	0.55%	0.16%	30.53	0.42%	0.10%	0.59%	58,219,833	202,709,000	567,121,000
8	MREBET																				
1	KARANGTURI	311,834,900	35,050,000	-	103,529,000	3146	0.34%	0.07%	357	0.20%	0.05%	1.42	0.21%	0.06%	38.66	0.53%	0.13%	0.31%	31,095,841	169,675,000	481,510,000
2	ONJE	338,123,500	38,005,000	-	103,529,000	4548	0.49%	0.10%	383	0.21%	0.05%	3.87	0.58%	0.18%	39.28	0.53%	0.13%	0.46%	45,705,028	187,239,000	525,363,000
3	SINDANG	338,123,500	38,005,000	-	103,529,000	3183	0.34%	0.07%	666	0.37%	0.09%	3.80	0.57%	0.17%	36.85	0.50%	0.13%	0.46%	45,568,289	187,102,000	525,226,000
4	TANGKISAN	364.412,100	40.960,000	-	103.529,000	5507	0.59%	0.12%	959	0.53%	0.13%	5.87	0.88%	0.27%	28.16	0.38%	0.10%	0.61%	60,910,450	205,399,000	569,811,000
5	KRADENAN	311,834,900	35,050,000	-	103,529,000	2582	0.28%	0.06%	339	0.19%	0.05%	1.07	0.16%	0.05%	33.34	0.45%	0.11%	0.26%	26,296,217	164,875,000	476,710,000
6	LAMBUR	285,546,300	32,095,000	-	103,529,000	2792	0.30%	0.06%	634	0.35%	0.09%	1.42	0.21%	0.06%	32.42	0.44%	0.11%	0.32%	32,057,614	167,682,000	453,228,000
7	SELAGANGGENG	311,834,900	35,050,000	-	103,529,000	3972	0.43%	0.09%	764	0.43%	0.11%	1.60	0.24%	0.07%	28.44	0.39%	0.10%	0.36%	35,845,892	174,425,000	486,260,000
8	MANGUNEGARA	311,834,900	35,050,000	-	103,529,000	3837	0.41%	0.08%	304	0.17%	0.04%	1.34	0.20%	0.06%	27.04	0.37%	0.09%	0.28%	27,537,970	166,117,000	477,952,000
9	KARANGNANGKA	311,834,900	35,050,000	-	103,529,000	3454	0.37%	0.07%	414	0.23%	0.06%	1.32	0.20%	0.06%	33.46	0.46%	0.11%	0.31%	30,324,556	168,904,000	480,739,000
10	MREBET	285,546,300	32,095,000	-	103,529,000	2418	0.26%	0.05%	872	0.49%	0.12%	1.11	0.17%	0.05%	34.48	0.47%	0.12%	0.34%	33,885,813	169,510,000	455,056,000
11	BOJONG	311,834,900	35,050,000	-	103,529,000	4027	0.43%	0.09%	1117	0.62%	0.16%	1.82	0.27%	0.08%	29.77	0.41%	0.10%	0.43%	42,293,956	180,873,000	492,708,000
12	SERAYU KARANGANYAR	311,834,900	35,050,000	-	103,529,000	2728	0.29%	0.06%	726	0.40%	0.10%	1.21	0.18%	0.05%	40.46	0.55%	0.14%	0.35%	35,005,926	173,585,000	485,420,000
13	SERAYU LARANGAN	285,546,300	32,095,000	-	103,529,000	3906	0.42%	0.08%	1119	0.62%	0.16%	1.86	0.28%	0.08%	24.46	0.33%	0.08%	0.41%	40,449,268	176,073,000	461,619,000
14	CAMPAKQAH	285,546,300	32,095,000	-	103,529,000	2932	0.31%	0.06%	704	0.39%	0.10%	1.39	0.21%	0.06%	36.87	0.50%	0.13%	0.35%	34,694,367	170,318,000	455,864,000
15	PAGERANDONG	364.412,100	40.960,000	-	103.529,000	4289	0.46%	0.09%	1102	0.61%	0.15%	3.34	0.50%	0.15%	30.31	0.41%	0.10%	0.50%	49,647,937	194,137,000	558,549,000
16	CIPAKU	364.412,100	40.960,000	-	103.529,000	8128	0.87%	0.17%	1665	0.93%	0.23%	3.42	0.52%	0.15%	25.60	0.35%	0.09%	0.65%	64,390,600	208,880,000	573,292,000
17	BINANGUN	338,123,500	38,005,000	95,400,000	103,529,000	4067	0.44%	0.09%	1698	0.95%	0.24%	3.82	0.58%	0.17%	33.14	0.45%	0.11%	0.61%	60,560,350	297,494,000	635,618,000
18	PENGALUSAN	364.412,100	40.960,000	103,200,000	103,529,000	6508	0.70%	0.14%	1848	1.03%	0.26%	3.95	0.59%	0.18%	30.73	0.42%	0.10%	0.68%	67,569,016	315,258,000	679,670,000
19	SANGKANAYU	311,834,900	35,050,000	87,600,000	103,529,000	5063	0.54%	0.11%	2142	1.19%	0.30%	2.25	0.34%	0.10%	31.89	0.43%	0.11%	0.62%	61,303,457	287,482,000	599,317,000
9	BOBOTSARI																				
1	GANDASULI	311,834,900	35,050,000	-	103,529,000	2672	0.29%	0.06%	266	0.15%	0.04%	0.83	0.13%	0.04%	23.67	0.32%	0.08%	0.21%	21,114,711	159,694,000	471,529,000
2	KALAPACUNG	285,546,300	32,095,000	-	103,529,000	2497	0.27%	0.05%	654	0.36%	0.09%	1.24	0.19%	0.06%	33.41	0.45%	0.11%	0.31%	31,266,435	166,890,000	452,436,000
3	KARANGMALANG	338,123,500	38,005,000	-	103,529,000	3365	0.36%	0.07%	628	0.35%	0.09%	2.43	0.37%	0.11%	23.40	0.32%	0.08%	0.35%	34,691,469	176,225,000	514,349,000
4	BANJARSARI	338,123,500	38,005,000	-	103,529,000	3889	0.42%	0.08%	797	0.44%	0.11%	2.46	0.37%	0.11%	34.78	0.47%	0.12%	0.42%	42,133,622	183,668,000	521,792,000
5	MAJAPURA	338,123,500	38,005,000	-	103,529,000	4847	0.52%	0.10%	381	0.21%	0.05%	1.42	0.21%	0.06%	29.30	0.40%	0.10%	0.32%	31,887,520	173,422,000	511,546,000
6	BOBOTSARI	338,123,500	38,005,000	-	103,529,000	6715	0.72%	0.14%	699	0.39%	0.10%	1.47	0.22%	0.07%	20.10	0.27%	0.07%	0.38%	37,382,142	178,916,000	517,040,000
7	KARANGDUREN	311,834,900	35,050,000	-	103,529,000	3592	0.39%	0.08%	1011	0.56%	0.14%	1.23	0.19%	0.06%	35.19	0.48%	0.12%	0.39%	39,097,346	177,676,000	489,511,000
8	PAKUNCEN	311,834,900	35,050,000	-	103,529,000	3156	0.34%	0.07%	771	0.43%	0.11%	1.62	0.24%	0.07%	36.95	0.50%	0.13%	0.37%	37,170,065	175,749,000	487,584,000
9	KARANGTALUN	311,834,900	35,050,000	-	103,529,000	3888	0.42%	0.08%	813	0.45%	0.11%	1.80	0.27%	0.08%	43.17	0.59%	0.15%	0.42%	42,235,137	180,814,000	492,649,000
10	GUNUNGKARANG	285,546,300	32,095,000	-	103,529,000	2134	0.23%	0.05%	474	0.26%	0.07%	1.34	0.20%	0.06%	32.90	0.45%	0.11%	0.28%	28,240,933	163,865,000	449,411,000
11	TALAGENING	311,834,900	35,050,000	-	103,529,000	3753	0.40%	0.08%	1361	0.76%	0.19%	1.97	0.30%	0.09%	32.04	0.44%	0.11%	0.47%	46,535,509	185,115,000	496,950,000
12	TLAGAYASA	311,834,900	35,050,000	-	103,529,000	3267	0.35%	0.07%	1391	0.77%	0.19%	2.02	0.31%	0.09%	27.35	0.37%	0.09%	0.45%	44,552,961	183,132,000	494,967,000
13	DAGAN	364.412,100	40.960,000	-	103.529,000	3853	0.41%	0.08%	384	0.21%	0.05%	1.62	0.24%	0.07%	31.68	0.43%	0.11%	0.32%	31,521,771	176,011,000	540,423,000
14	PALUMBUNGAN	232,969,100	26,186,000	-	103,529,000	2112	0.23%	0.05%	351	0.20%	0.05%	1.83	0.28%	0.08%	31.58	0.43%	0.11%	0.28%	28,275,929	157,991,000	390,960,000
15	LIMBASARI	311,834,900	35,050,000	-	103,529,000	3643	0.39%	0.08%	1017	0.57%	0.14%	2.23	0.34%	0.10%	30.61	0.42%	0.10%	0.42%	42,196,417	180,775,000	492,610,000
16	PALUMBUNGAN WETAN	232,969,100	26,186,000	-	103,529,000	1421	0.15%	0.03%	370	0.21%	0.05%	1.32	0.20%	0.06%	36.24	0.49%	0.12%	0.26%	26,320,343	156,035,000	389,004,000
10	KARANGREJA																				
1	SERANG	364.412,100	40.960,000	103,200,000	103,529,000	7583	0.81%	0.16%	2282	1.27%	0.32%	13.25	2.00%	0.60%	30.76	0.42%	0.10%	1.18%	117,711,347	365,400,000	729,812,000
2	KUTABAWA	364.412,100	40.960,000	-	103,529,000	6393	0.69%	0.14%	2140	1.19%	0.30%	7.69	1.16%	0.35%	23.37	0.32%	0.08%	0.86%	85,697,613	230,187,000	594,599,000
3	SIWARAK	338,123,500	38,005,000	-	103,529,000	7045	0.76%	0.15%	2042	1.14%	0.28%	6.30	0.95%	0.29%	32.76	0.45%	0.11%	0.83%	82,681,014	224,215,000	562,339,000
4	TLAHAB LOR	390,700,700	43,915,000	-	103,529,000	8854	0.95%	0.19%	2408	1.34%	0.34%	5.87	0.88%	0.27%	26.28	0.36%	0.09%	0.88%	87,450,075	234,894,000	625,595,000
5	TLAHAB KIDUL	338,123,500	38,005,000	-	103,529,000	5641	0.61%	0.12%	2025	1.13%	0.28%	6.01	0.91%	0.27%	29.90	0.41%	0.10%	0.78%	77,162,560		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	19=(9)+(12)+(15)+1	(20)	21=(4)+(5)+(6)+(20)	(22)=(3)+(21)
4	BUNGKANEL	338,123,500	38,005,000	-	103,529,000	2902	0.31%	0.06%	329	0.18%	0.05%	2.31	0.35%	0.10%	19.61	0.27%	0.07%	0.28%	27,742,278	169,276,000	507,400,000
5	LUMPANG	285,546,300	32,095,000	-	103,529,000	1603	0.17%	0.03%	279	0.16%	0.04%	1.17	0.18%	0.05%	37.07	0.50%	0.13%	0.25%	25,094,371	160,718,000	446,264,000
6	KARANGGEDANG	311,834,900	35,050,000	-	103,529,000	2151	0.23%	0.05%	349	0.19%	0.05%	1.32	0.20%	0.06%	29.05	0.40%	0.10%	0.25%	25,156,774	163,736,000	475,571,000
7	KABUNDERAN	285,546,300	32,095,000	-	103,529,000	1300	0.14%	0.03%	132	0.07%	0.02%	0.93	0.14%	0.04%	30.90	0.42%	0.11%	0.19%	19,238,969	154,863,000	440,409,000
8	JAMBUDESA	338,123,500	38,005,000	-	103,529,000	3364	0.36%	0.07%	842	0.47%	0.12%	1.91	0.29%	0.09%	37.97	0.52%	0.13%	0.41%	40,261,669	181,796,000	519,920,000
9	MARIBAYA	311,834,900	35,050,000	-	103,529,000	4147	0.44%	0.09%	1144	0.64%	0.16%	3.14	0.47%	0.14%	31.30	0.43%	0.11%	0.50%	49,352,008	187,931,000	499,766,000
10	KARANGANYAR	364,412,100	40,960,000	-	103,529,000	4851	0.52%	0.10%	1077	0.60%	0.15%	2.79	0.42%	0.13%	19.24	0.26%	0.07%	0.45%	44,300,728	188,790,000	553,202,000
11	BANJARKERTA	364,412,100	40,960,000	-	103,529,000	3609	0.39%	0.08%	731	0.41%	0.10%	2.70	0.41%	0.12%	28.25	0.38%	0.10%	0.40%	39,505,909	183,995,000	548,407,000
12	KALIJARAN	364,412,100	40,960,000	-	103,529,000	4876	0.52%	0.10%	1119	0.62%	0.16%	3.30	0.50%	0.15%	35.41	0.48%	0.12%	0.53%	52,678,478	197,167,000	561,579,000
13	KALIORI	364,412,100	40,960,000	-	103,529,000	4489	0.48%	0.10%	1040	0.58%	0.14%	5.91	0.89%	0.27%	43.97	0.60%	0.15%	0.66%	65,391,652	209,881,000	574,293,000
12	KARANGMONCOL																				
1	KARANGSARI	364,412,100	40,960,000	-	103,529,000	4268	0.46%	0.09%	775	0.43%	0.11%	3.99	0.60%	0.18%	30.57	0.42%	0.10%	0.48%	48,079,672	192,569,000	556,981,000
2	PEPEDAN	364,412,100	40,960,000	-	103,529,000	3871	0.42%	0.08%	537	0.30%	0.07%	3.84	0.58%	0.17%	33.60	0.46%	0.11%	0.45%	44,332,463	188,821,000	553,233,000
3	PEKIRINGAN	364,412,100	40,960,000	-	103,529,000	4185	0.45%	0.09%	290	0.16%	0.04%	2.15	0.32%	0.10%	25.02	0.34%	0.09%	0.31%	31,088,163	175,577,000	539,989,000
4	GRANTUNG	390,700,700	43,915,000	-	103,529,000	2659	0.29%	0.06%	263	0.15%	0.04%	3.20	0.48%	0.14%	38.45	0.52%	0.13%	0.37%	36,688,960	184,133,000	574,834,000
5	RAJAWANA	390,700,700	43,915,000	-	103,529,000	4752	0.51%	0.10%	585	0.33%	0.08%	3.20	0.48%	0.14%	35.03	0.48%	0.12%	0.45%	44,446,394	191,890,000	582,591,000
6	TAJUG	364,412,100	40,960,000	-	103,529,000	3792	0.41%	0.08%	556	0.31%	0.08%	2.33	0.35%	0.11%	34.26	0.47%	0.12%	0.38%	37,827,097	182,316,000	546,728,000
7	TAMANSARI	390,700,700	43,915,000	-	103,529,000	7004	0.75%	0.15%	675	0.38%	0.09%	6.07	0.92%	0.27%	22.67	0.31%	0.08%	0.60%	59,229,287	206,673,000	597,374,000
8	BALERAKSA	364,412,100	40,960,000	-	103,529,000	7928	0.85%	0.17%	747	0.42%	0.10%	4.38	0.66%	0.20%	32.43	0.44%	0.11%	0.58%	57,901,866	202,391,000	566,803,000
9	TUNJUNG MULI	364,412,100	40,960,000	-	103,529,000	11110	1.19%	0.24%	2033	1.13%	0.28%	9.10	1.37%	0.41%	19.63	0.27%	0.07%	1.00%	99,379,238	243,868,000	608,280,000
10	KRAMAT	364,412,100	40,960,000	-	103,529,000	3819	0.41%	0.08%	546	0.30%	0.08%	2.81	0.42%	0.13%	33.96	0.46%	0.12%	0.40%	39,827,025	184,316,000	548,728,000
11	SIRAU	364,412,100	40,960,000	103,200,000	103,529,000	4998	0.54%	0.11%	1625	0.90%	0.23%	6.87	1.04%	0.31%	56.23	0.77%	0.19%	0.84%	83,035,381	330,724,000	695,136,000
13	REMBANG																				
1	WLAHAR	338,123,500	38,005,000	-	103,529,000	3560	0.38%	0.08%	758	0.42%	0.11%	4.41	0.67%	0.20%	30.54	0.42%	0.10%	0.49%	48,236,380	189,770,000	527,894,000
2	BANTARBARANG	364,412,100	40,960,000	-	103,529,000	8607	0.92%	0.18%	1778	0.99%	0.25%	9.81	1.48%	0.44%	23.19	0.32%	0.08%	0.95%	94,903,068	239,392,000	603,804,000
3	KARANGBAWANG	364,412,100	40,960,000	103,200,000	103,529,000	1987	0.21%	0.04%	134	0.07%	0.02%	3.66	0.55%	0.17%	44.62	0.61%	0.15%	0.38%	37,651,582	285,341,000	649,753,000
4	GUNUNGWULED	390,700,700	43,915,000	-	103,529,000	5388	0.58%	0.12%	1269	0.71%	0.18%	5.70	0.86%	0.26%	32.83	0.45%	0.11%	0.66%	65,750,698	213,195,000	603,896,000
5	LOSARI	416,989,300	46,870,000	-	103,529,000	8958	0.96%	0.19%	974	0.54%	0.14%	7.28	1.10%	0.33%	20.66	0.28%	0.07%	0.73%	72,307,130	222,706,000	639,695,000
6	BODASKARANGJATI	364,412,100	40,960,000	-	103,529,000	4047	0.43%	0.09%	555	0.31%	0.08%	2.69	0.41%	0.12%	34.75	0.47%	0.12%	0.40%	40,161,135	184,650,000	549,062,000
7	WANOGARA WETAN	338,123,500	38,005,000	-	103,529,000	2827	0.30%	0.06%	695	0.39%	0.10%	2.14	0.32%	0.10%	39.93	0.54%	0.14%	0.39%	38,790,931	180,325,000	518,449,000
8	WANOGARA KULON	311,834,900	35,050,000	-	103,529,000	2094	0.22%	0.04%	522	0.29%	0.07%	1.34	0.20%	0.06%	41.92	0.57%	0.14%	0.32%	31,872,414	170,451,000	482,286,000
9	MAKAM	364,412,100	40,960,000	-	103,529,000	9627	1.03%	0.21%	1766	0.98%	0.25%	6.79	1.02%	0.31%	19.45	0.26%	0.07%	0.83%	82,049,261	226,538,000	590,950,000
10	SUMAMPIR	364,412,100	40,960,000	-	103,529,000	9556	1.03%	0.21%	1913	1.06%	0.27%	5.82	0.88%	0.28%	31.34	0.43%	0.11%	0.84%	83,585,372	228,074,000	592,486,000
11	TANALUM	338,123,500	38,005,000	95,400,000	103,529,000	3847	0.41%	0.08%	1628	0.90%	0.23%	4.58	0.69%	0.21%	41.58	0.57%	0.14%	0.66%	65,359,365	302,293,000	640,417,000
12	PANUSUPAN	338,123,500	38,005,000	-	103,529,000	8417	0.90%	0.18%	1859	1.03%	0.26%	9.41	1.42%	0.43%	40.14	0.55%	0.14%	1.00%	99,533,635	241,068,000	579,192,000
14	BOJONGSARI																				
1	BROBOT	338,123,500	38,005,000	-	103,529,000	3943	0.42%	0.08%	272	0.15%	0.04%	1.26	0.19%	0.06%	39.03	0.53%	0.13%	0.31%	31,060,474	172,594,000	510,718,000
2	GEMBONG	338,123,500	38,005,000	-	103,529,000	3631	0.39%	0.08%	318	0.18%	0.04%	1.28	0.19%	0.06%	34.27	0.47%	0.12%	0.30%	29,511,667	171,046,000	509,170,000
3	GALUH	338,123,500	38,005,000	-	103,529,000	3054	0.33%	0.07%	325	0.18%	0.05%	1.04	0.16%	0.05%	34.31	0.47%	0.12%	0.27%	27,301,824	168,836,000	506,960,000
4	BANJARAN	364,412,100	40,960,000	-	103,529,000	5906	0.63%	0.13%	1075	0.60%	0.15%	3.32	0.50%	0.15%	35.94	0.49%	0.12%	0.55%	54,537,531	199,027,000	563,439,000
5	PATEMON	338,123,500	38,005,000	-	103,529,000	4310	0.46%	0.09%	1175	0.65%	0.16%	2.43	0.37%	0.11%	39.98	0.54%	0.14%	0.50%	49,882,053	191,416,000	529,540,000
6	BOJONGSARI	416,989,300	46,870,000	-	103,529,000	6187	0.66%	0.13%	718	0.40%	0.10%	2.33	0.35%	0.11%	20.60	0.28%	0.07%	0.41%	40,553,657	190,953,000	607,942,000
7	KAJONGAN	338,123,500	38,005,000	-	103,529,000	5359	0.57%	0.11%	1048	0.58%	0.15%	1.99	0.30%	0.09%	43.21	0.59%	0.15%	0.50%	49,473,458	191,007,000	529,131,000
8	KARANGBANJAR	364,412,100	40,960,000	-	103,529,000	4393	0.47%	0.09%	491	0.27%	0.07%	1.52	0.23%	0.07%	37.36	0.51%	0.13%	0.36%	35,621,176	180,110,000	544,522,000
9	BEJI	311,834,900	35,050,000	-	103,529,000	3967	0.43%	0.09%	740	0.41%	0.10%	1.52	0.23%	0.07%	29.84	0.41%	0.10%	0.36%	35,611,729	174,191,000	486,026,000
10	PAGEDANGAN	364,412,100	40,960,000	-	103,529,000	3930	0.42%	0.08%	809	0.45%	0.11%	1.62	0.24%	0.07%	41.30	0.56%	0.14%	0.41%	40,820,418	185,309,000	549,721,000
11	PEKALONGAN	364,412,100	40,960,000	-	103,529,000	5672	0.61%	0.12%	1121	0.62%	0.16%	1.58	0.24%	0.07%	27.63	0.38%	0.09%	0.44%	44,039,887	188,529,000	552,941,000
12	METENGGENG	338,123,500	38,005,000	-	103,529,000	4217	0.45%	0.09%	1248	0.69%	0.17%	2.03	0.31%	0.09%	32.24	0.44%	0.11%	0.47%	46,302,674	187,837,000	525,961,000
13	BUMISARI	364,																			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	19)=(9)+(12)+(15)+(18)	(20)	21)=(4)+(5)+(6)+(20)	(22)=(3)+(21)
5	GEMURUH	311,834,900	35,050,000	-	103,529,000	4097	0.44%	0.09%	453	0.25%	0.06%	1.85	0.28%	0.08%	44.00	0.60%	0.15%	0.38%	38,212,504	176,792,000	488,627,000
6	DAWUHAN	364,412,100	40,960,000	-	103,529,000	4187	0.45%	0.09%	619	0.34%	0.09%	1.66	0.25%	0.08%	33.02	0.45%	0.11%	0.36%	36,120,371	180,609,000	545,021,000
7	PRIGI	338,123,500	38,005,000	-	103,529,000	3135	0.34%	0.07%	419	0.23%	0.06%	1.42	0.21%	0.06%	41.80	0.57%	0.14%	0.33%	32,991,838	174,526,000	512,650,000
8	PADAMARA	311,834,900	35,050,000	-	103,529,000	2949	0.32%	0.06%	212	0.12%	0.03%	1.43	0.22%	0.06%	25.60	0.35%	0.09%	0.24%	24,296,667	162,876,000	474,711,000
9	PURBAYASA	285,546,300	32,095,000	-	103,529,000	2230	0.24%	0.05%	212	0.12%	0.03%	0.95	0.14%	0.04%	30.45	0.41%	0.10%	0.22%	22,264,746	157,888,000	443,435,000
10	KALITINGGAR	311,834,900	35,050,000	-	103,529,000	2683	0.29%	0.06%	181	0.10%	0.03%	0.97	0.15%	0.04%	40.76	0.56%	0.14%	0.27%	26,384,032	164,963,000	476,798,000
11	MIPIRAN	311,834,900	35,050,000	-	103,529,000	3341	0.36%	0.07%	859	0.48%	0.12%	1.36	0.20%	0.06%	43.79	0.60%	0.15%	0.40%	39,914,734	178,494,000	490,329,000
12	KARANGGAMBAS	311,834,900	35,050,000	-	103,529,000	4211	0.45%	0.09%	570	0.32%	0.08%	1.48	0.22%	0.07%	28.12	0.38%	0.10%	0.33%	33,016,990	171,596,000	483,431,000
13	KALITINGGAR KIDUL	285,546,300	32,095,000	-	103,529,000	1735	0.19%	0.04%	117	0.07%	0.02%	0.85	0.13%	0.04%	32.75	0.45%	0.11%	0.20%	20,220,248	155,844,000	441,390,000
16	PENGADEGAN																				
1	PANUNGGALAN	285,546,300	32,095,000	-	103,529,000	2246	0.24%	0.05%	360	0.20%	0.05%	3.69	0.56%	0.17%	41.28	0.56%	0.14%	0.41%	40,335,199	175,959,000	461,505,000
2	LARANGAN	364,412,100	40,960,000	103,200,000	103,529,000	4752	0.51%	0.10%	1020	0.57%	0.14%	4.73	0.71%	0.21%	37.94	0.52%	0.13%	0.59%	58,380,260	306,049,000	670,461,000
3	PASUNGGINGAN	390,700,700	43,915,000	111,000,000	103,529,000	5990	0.64%	0.13%	1171	0.65%	0.16%	5.29	0.80%	0.24%	33.66	0.46%	0.11%	0.65%	64,140,519	322,585,000	713,286,000
4	PENGADEGAN	416,989,300	46,870,000	118,800,000	103,529,000	10045	1.08%	0.22%	1988	1.11%	0.28%	6.74	1.02%	0.30%	28.75	0.39%	0.10%	0.89%	88,927,397	358,126,000	775,115,000
5	KARANGJOHO	311,834,900	35,050,000	87,600,000	103,529,000	2158	0.23%	0.05%	470	0.26%	0.07%	2.46	0.37%	0.11%	40.17	0.55%	0.14%	0.36%	35,745,058	261,924,000	573,759,000
6	BEDAGAS	364,412,100	40,960,000	-	103,529,000	4544	0.49%	0.10%	1030	0.57%	0.14%	6.47	0.98%	0.29%	27.50	0.37%	0.09%	0.63%	62,344,578	206,834,000	571,246,000
7	TUMANGGAL	364,412,100	40,960,000	103,200,000	103,529,000	4131	0.44%	0.09%	1523	0.85%	0.21%	4.17	0.63%	0.19%	36.75	0.50%	0.13%	0.61%	61,044,385	308,733,000	673,145,000
8	TEGALPINGEN	338,123,500	38,005,000	-	103,529,000	4598	0.49%	0.10%	1095	0.61%	0.15%	5.06	0.76%	0.23%	32.39	0.44%	0.11%	0.59%	58,647,646	200,182,000	538,306,000
9	TETEL	311,834,900	35,050,000	-	103,529,000	2530	0.27%	0.05%	716	0.40%	0.10%	3.48	0.52%	0.16%	42.39	0.58%	0.14%	0.46%	45,286,068	183,865,000	495,700,000
17	KARANGJAMBU																				
1	PURBASARI	311,834,900	35,050,000	87,600,000	103,529,000	6431	0.69%	0.14%	1375	0.77%	0.19%	9.06	1.37%	0.41%	30.62	0.42%	0.10%	0.84%	83,837,268	310,016,000	621,851,000
2	SIRANDU	259,257,700	29,141,000	72,000,000	103,529,000	3002	0.32%	0.06%	620	0.35%	0.09%	5.74	0.86%	0.26%	36.27	0.49%	0.12%	0.53%	53,036,217	257,706,000	516,964,000
3	KARANGJAMBU	311,834,900	35,050,000	87,600,000	103,529,000	5543	0.59%	0.12%	1257	0.70%	0.17%	7.98	1.20%	0.36%	28.05	0.38%	0.10%	0.75%	74,578,341	300,757,000	612,592,000
4	SANGUWATANG	311,834,900	35,050,000	87,600,000	103,529,000	5111	0.55%	0.11%	1609	0.90%	0.22%	6.80	1.02%	0.31%	42.56	0.58%	0.14%	0.79%	78,111,559	304,291,000	616,126,000
5	JINGKANG	311,834,900	35,050,000	87,600,000	103,529,000	4219	0.45%	0.09%	1925	1.07%	0.27%	7.80	1.18%	0.35%	33.89	0.46%	0.12%	0.83%	82,147,677	308,327,000	620,162,000
6	DANASARI	338,123,500	38,005,000	95,400,000	103,529,000	2924	0.31%	0.06%	820	0.46%	0.11%	6.32	0.95%	0.29%	34.31	0.47%	0.12%	0.58%	57,608,503	294,543,000	632,667,000
18	KERTANEGARA																				
1	KRANGEAN	364,412,100	40,960,000	-	103,529,000	6928	0.74%	0.15%	1633	0.91%	0.23%	4.86	0.73%	0.22%	21.05	0.29%	0.07%	0.67%	66,308,187	210,787,000	575,209,000
2	DARMA	285,546,300	32,095,000	-	103,529,000	1658	0.18%	0.04%	379	0.21%	0.05%	1.73	0.26%	0.08%	31.41	0.43%	0.11%	0.27%	27,181,831	162,806,000	448,352,000
3	LANGKAP	338,123,500	38,005,000	-	103,529,000	4090	0.44%	0.09%	1272	0.71%	0.18%	2.98	0.45%	0.13%	30.73	0.42%	0.10%	0.50%	50,126,220	191,660,000	529,784,000
4	ADIARSA	338,123,500	38,005,000	-	103,529,000	3232	0.35%	0.07%	353	0.20%	0.05%	3.65	0.55%	0.17%	30.40	0.41%	0.10%	0.39%	38,477,421	180,011,000	518,135,000
5	KARANGASEM	364,412,100	40,960,000	-	103,529,000	4696	0.50%	0.10%	1055	0.59%	0.15%	3.97	0.60%	0.18%	23.30	0.32%	0.08%	0.51%	50,314,435	194,803,000	559,215,000
6	KARANGPUCUNG	311,834,900	35,050,000	-	103,529,000	2328	0.25%	0.05%	344	0.19%	0.05%	1.64	0.25%	0.07%	28.70	0.39%	0.10%	0.27%	26,798,849	165,378,000	477,213,000
7	CONDONG	285,546,300	32,095,000	-	103,529,000	1839	0.20%	0.04%	290	0.16%	0.04%	1.13	0.17%	0.05%	43.98	0.60%	0.15%	0.28%	27,907,104	163,531,000	449,077,000
8	KASIH	338,123,500	38,005,000	-	103,529,000	3440	0.37%	0.07%	701	0.39%	0.10%	2.28	0.34%	0.10%	29.23	0.40%	0.10%	0.37%	37,151,368	178,885,000	516,809,000
9	KARANGTENGAH	338,123,500	38,005,000	-	103,529,000	3172	0.34%	0.07%	640	0.36%	0.09%	1.77	0.27%	0.08%	27.66	0.38%	0.09%	0.33%	32,933,004	174,467,000	512,591,000
10	KERTANEGARA	364,412,100	40,960,000	-	103,529,000	4488	0.48%	0.10%	311	0.17%	0.04%	1.87	0.28%	0.08%	25.89	0.35%	0.09%	0.31%	31,044,384	175,533,000	539,945,000
11	MERGASANA	311,834,900	35,050,000	-	103,529,000	1669	0.18%	0.04%	160	0.09%	0.02%	1.14	0.17%	0.05%	33.64	0.46%	0.11%	0.22%	22,292,225	160,871,000	472,706,000
	TOTAL	74,425,234,000	8,365,373,000	3,117,000,000	23,190,496,000	932,174	100%	20%	179,673	100%	25%	663	100%	30%	7,343	100%	25%	100%	9,938,627,700	44,611,496,000	119,036,746,000

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 17 September 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI